

Pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Program Benih Jagung Kepada Petani Di Kecamatan Dumoga Barat

Yesika Ingrid Limbat¹

Johny Lumolos²

Ismail Sumampow³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kurang optimalnya pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow dalam program benih jagung kepada petani di Kecamatan Dumoga Barat. Salah satu program pembangunan Kementerian Pertanian adalah program Subsidi Benih Jagung yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilanjutkan pada tahun 2020. Tujuan dari program subsidi benih jagung adalah untuk meningkatkan luas pertanaman jagung hibrida, produktifitas dan produksi jagung, kesempatan kerja dan pendapatan petani, mendorong berkembangnya industri benih jagung nasional dan industri pakan serta pangan berbahan baku jagung, serta mendukung upaya pencapaian swasembada jagung. Sampai sejauh mana keberhasilan program kebijakan subsidi benih jagung ini perlu dievaluasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam program benih jagung meliputi teknik Inspeksi langsung, on the spot observation, dan Pengawasan on the spot report. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Pertanian masih dianggap kurang dan belum optimal

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Pertanian, Program Benih Jagung

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Tujuan dari program subsidi benih jagung adalah untuk meningkatkan luas pertanaman jagung hibrida, produktifitas dan produksi jagung, kesempatan kerja dan pendapatan petani, mendorong berkembangnya industri benih jagung nasional dan industri pakan serta pangan berbahan baku jagung, serta mendukung upaya pencapaian swasembada jagung. Bantuan benih jagung yang diberikan pada petani atau kelompok tani oleh Departemen Pertanian sebanyak 15 kg per ha. Spesifikasi benih jagung yang diberikan pada petani adalah benih jagung hibrida berlabel biru dan dikemas dengan daya tumbuh minimal 85 persen serta merupakan benih varitas hibrida yang diminati petani.

Kriteria kelompok tani sasaran adalah kelompok tani yang bersedia menanam jagung hibrida dan menerapkan teknologi sesuai anjuran dalam melakukan budidaya jagung. Pada kenyataannya, kelompok tani sasaran di Kecamatan Dumoga Barat belum bisa menerapkan teknologi anjuran 100 persen, terutama pada komponen pengolahan tanah, sebagian petani melakukan penanaman tanpa melalui pengolahan tanah seperti pembajakan. Guna memperoleh manfaat secara luas, penetapan kelompok tani sasaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan dan potensi pengembangan dimasingmasing daerah baik dilahan sawah maupun dilahan kering. Untuk menghindari adanya kelompok tani fiktif, kepengurusan kelompok tani penerima subsidi harus disahkan oleh Kepala Desa dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu : Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Disamping itu, kelompok tani penerima subsidi harus mempunyai rekening bank dan bagi yang belum mempunyai rekening bank, harus bersedia membuka rekening bank.

Sumber pembiayaan dari pelaksanaan program ini adalah APBN

2020 pada DIPA Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Pertanian. Anggaran yang tersedia ini dialokasikan untuk pengadaan benih dan biaya operasional pendukung pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2020. Agar lebih terkoordinasi dan terarah, pada pelaksanaan program pengembangan kawasan agribisnis melalui bantuan benih, Tim Pembina di tingkat Provinsi dan Tim Teknis di tingkat Kabupaten dibentuk. Tim Pembina di Provinsi bertugas antara lain menetapkan Kabupaten sasaran, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Tim pelaksana, serta membantu pemecahan masalah; pemantauan dan pengendalian. Sedangkan Tim Teknis di Kabupaten bertugas antara lain menyiapkan kelompok sasaran, melakukan seleksi dan verifikasi kelompok tani, RDKK-RUK, serta memberikan bimbingan, pemantauan dan pengendalian.

Dengan demikian jelas bahwa terjadi rentang kendali antara pemerintah pusat sampai ke pemerintah kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Pertanian, hasil pengamatan dalam pra penelitian, peneliti memperoleh informasi dari para petani jagung yang ada di Kecamatan Dumoga Barat bahwa mekanisme pencairan dana dirasakan agak lambat pelaksanaannya. Dana baru bisa dicairkan 1,5 bulan setelah tanam. Petani tidak dapat menunggu lebih lama lagi, karena harus berpacu dengan ketersediaan air. Untuk memperoleh pertumbuhan dan hasil yang baik, pada saat mulai musim hujan jagung harus segera ditanam. Kebutuhan benih tepat pada saat tanam dipenuhi dari pinjaman pada produsen/distributor benih, namun kualitas benih yang diterima petani kurang baik, terlihat dari pertumbuhannya yang kurang merata. Pada kenyataannya, spesifikasi benih jagung yang harus diberikan pada petani sebagai benih

jagung hibrida berlabel biru dan dikemas dengan daya tumbuh minimal 85 persen belum dapat terpenuhi karena ketidaktepatan pencairan dana.

Hasil pra penelitian ditemukan fakta bahwa petani mengeluhkan benih yang disalurkan kurang baik kualitasnya, untuk itu diharapkan pemerintah juga turut mengawasi agar benih tersalur dengan baik secara kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktunya, walaupun dalam program ini diharapkan pengawasan datang dari masyarakat. Agar tidak tergantung pada pihak swasta, perlu juga dikembangkan kelembagaan perbenihan ditingkat petani. Dalam hal permodalan, kemitraan dengan pihak swasta sudah ada, namun hak dan kewajiban petani serta mitra perlu dipertegas dengan MOU sehingga petani dalam posisi yang seimbang dengan mitra. Pendampingan kelompok tani dalam pelaksanaan ini seyogyanya dilakukan oleh: penyuluh pertanian, perguruan tinggi, pengawas benih, Lembaga Swadaya Masyarakat, petugas OPT, peneliti, produsen sarana produksi pertanian dan KTNA. Namun pada pelaksanaannya hanya penyuluh pertanian lapangan tingkat kecamatan yang benar-benar aktif mendampingi kelompok tani ini, sedangkan pengawasan langsung dari Dinas Pertanian Kabupaten Bolmong, kurang optimal dilakukan

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian terletak di Kecamatan Dumoga Barat dan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow yang terletak di Ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Lolak.

Fokus dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian pada program benih jagung yang diberikan kepada petani, dengan demikian peneliti akan menjelaskan aspek

pengawasan, berdasarkan konsep Henry Fayol (Siagian, 2003:115) yang mengatakan proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam Teknik pengawasan adapun Teknik pengawasn itu sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung,
 - a. direct inspection atau inspeksi langsung
 - b. on-the-spot observation merupakan pengawasan langsung di tempat pengamatan
 - c. on-the-spot report merupakan pengawasan pada laporan yang diberikan oleh bawahan secara langsung atas hasil pekerjaannya

2. Pengawasan tidak langsung

Pengambilan informan dilakukan dengan cara pemilihan informan atau orang yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, tentu atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang penulis anggap kompeten dengan masalah yang diteliti. adapun yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pertanian
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
4. Ketua Kelompok Petani Jagung

Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui gambaran umum pengawasan Dinas Pertanian dalam program benih jagung didasarkan pada dua teknik pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan secara pribadi yang dilakukan pengawas atau seorang pemimpin dalam suatu organisasi dengan cara memeriksa, meneliti, mengecek sendiri ditempat berlangsungnya pekerjaan. Pengawasan langsung meliputi Pengawasan langsung meliputi a) inspeksi langsung, b) on the spot observation, c) on the spot report.

- a. inspeksi langsung

Teknik Inspeksi langsung yaitu peninjauan secara pribadi, mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Dinas Pertanian mempunyai pegawai yang khusus bertugas pada bagian pengawasan dengan teknik inspeksi langsung ditambah satu orang petugas kecamatan yang ada di kantor PPL, pegawai yang bertugas ini melakukan pengawasan terus menerus setiap hari dimulai dari proses penyaluran sampai pemanfaatan oleh petani, selain dari pegawai yang ditugaskan pada bagian pengawasan terdapat satu tenaga ahli yg khusus untuk menganalisa kualitas benih yang dibagikan kepada para petani. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan staf pegawai yang bertugas mengawasi program penyaluran benih jagung yang mengatakan:

“untuk bagian pengawasan ada dua orang pegawai yang bertugas mengawasi, satu dari dinas pertanian dan satulagi dari PPL yang ada di masing-masing kecamatan, dan itu juga terkadang saya turun langsung mengawasi apakah aktivitas penanaman, pemeliharaan seperti gulma yang berada di lahan tanakan jagung, bedeng yang ada sesuai dengan kriteria atau tidak, hal ini lebih semata-mata untuk menjamin keberhasilan benih yang dibagikan untuk menjadi hasil yang baik”.

Berdasarkan pada wawancara dengan informan dalam menjalankan tanggung jawabnya melakukan pengawasan terhadap proses produksi jagung mulai dari disalurkan sampai ditanam, pengawasan yang dilakukan oleh petugas terjadi bukan hanya pada saat penyaluran benih, tetapi juga dilakukan dengan turun langsung di lahan tanaman jagung menyangkut hal-hal teknis sesuai dengan ketentuan penanaman jagung.

2. on the spot observation

Pengawasan on the spot observation merupakan pengawasan langsung di tempat pengamatan untuk

melihat sendiri bagaimana cara petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya. Di Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow pengawasan dengan cara on the spot observation dilakukan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang bahwa:

“untuk pengawasan langsung desa saya staf yang turun langsung, disana kita mengawasi apakah benih yang dibagikan sesuai dengan ketentuan per kelompok tani, juga kami mengawasi kualitas dari benih tersebut, jika terjadi atau ditemukan hal-hal yang janggal kami pending penyaluran benih jagungnya”.

Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan analisa peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai kecuali mendapatkan izin kerja tidak diperbolehkan meninggalkan kantor
- b. Jika pegawai hendak meninggalkan kantor dengan alasan yang mendesak maka diharuskan membuat surat izin dan diserahkan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas

Berdasarkan temuan di lapangan melalui hasil wawancara dengan petani yang menjadi informan Dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya dalam program penyaluran benih di Kecamatan dumoga Barat belum berjalan secara optimal karena pengawasan hanya dilakukan selama 1 kali dan tidak berlangsung secara kontinyu sehingga mengakibatkan penyaluran benih bibit tidak termanfaatkan dengan baik oleh para petani.

3. on the spot report

Pengawasan on the spot report merupakan pengawasan pada laporan

yang diberikan oleh bawahan secara langsung atas hasil pekerjaannya. Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow, pengawasan bawahan terhadap atasan sangat jarang terjadi hal ini karena antara pimpinan dan bawahan terdapat etika birokrasi. Antara pimpinan dan bawahan hanya datang ke kantor untuk absen, antar bawahan dan pimpinan sama-sama mengejar absen yang dijadikan formalitas saja demi kelancaran cairnya gaji dan jika diperlukan dikemudian hari. Pimpinan sama sekali tidak memberikan contoh yang baik terhadap bawahan dengan malasnya datang ke lokasi penyaluran benih, khususnya kepada para petani dan malasnya mengawasi proses pendistribusian benih di kelompok tani akibatnya PPL juga ikut ikutan malas ke kantor, pimpinan sama sekali tidak memberi teguran ataupun sanksi jika bawahan malas ke kantor dan tidak menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Antara pimpinan dan bawahan sama-sama cuek dan tidak peduli pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti penjelasan oleh salah satu petani jagung yang berhasil peneliti temui memberikan tanggapan terhadap kinerja pengawasan dan pendampingan oleh PPL mengungkapkan bahwa: *“banyak yang mengeluhkan kinerja PPL di Kecamatan Dumoga Barat, mereka sangat jarang datang mengawasi, bagaimana mau mengawasi jalannya program-program yang mereka buat kalau mereka jarang turun ke lokasi”*.

Berdasarkan pada wawancara tersebut peneliti menemukan adanya keluhan-keluhan dari petani yang mengeluhkan pengawasan kinerja PPL di dinas pertanian untuk datang ke lokasi pertanian mengawasi jalannya proses penanaman hingga proses produksi pada saat panen.

Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pengawasan yaitu segala aktivitas dalam bertugas yang dilakukan dapat diketahui, apakah berjalan sesuai dengan prosedur atau tidak. Dengan adanya pengawasan kedisiplinan pegawai dalam bekerja dapat diketahui, dapat dilihat manakah pegawai yang

disiplin dan mana yang kurang disiplin, sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai, sehingga program benih bibit jagung dapat terselenggara dengan baik. Adapun peranan pengawasan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meningkatkan pengawasan program yaitu:

- a. Menjamin dan mengusahakan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan apakah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sebelum melaksanakan sebuah kegiatan setiap perusahaan atau organisasi membuat perencanaan terlebih dahulu. Tujuannya rencana tersebut dapat menjadi pedoman dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam suatu organisasi suatu kegiatan tidak akan memiliki tujuan dan sasaran tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Tanpa perencanaan suatu kegiatan tidak memiliki pedoman bagi yang menjalankannya
- b. Mencegah terjadinya penyimpangan ketidaksesuaian suatu pekerjaan kadang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Diperlukan suatu tindakan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan, tindakan tersebut yaitu dilakukannya pengawasan. Dengan pengawasan pimpinan dapat mencegah dan mengetahui jika terdapat penyimpangan dalam pekerjaan.
- c. Memperbaiki penyimpangan atau kesalahan yang terjadi kesalahan dalam suatu kegiatan biasa terjadi dalam setiap pelaksanaan suatu pekerjaan baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar apabila tidak ditangani dengan baik akan mengganggu tercapainya tujuan dalam pekerjaan.

Kesalahan bisa diakibatkan faktor manusia dan non manusia. Oleh karena itu pengawasan sangat diperlukan agar tiap pelaksanaan kegiatan pimpinan dapat memonitor dengan baik agar kegiatan tetap pada alurnya. Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow mengatakan bahwa:

“pengawasan disini manfaatnya untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan-penyimpangan. Kadang dalam suatu kegiatan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terjadi kesalahan-kesalahan kecil disini manfaatnya adanya pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan dan jika ada suatu penyimpangan yang terjadi kami dapat dengan cepat memperbaikinya agar penyimpangan tersebut tidak terjadi lagi”.

Berdasarkan wawancara tersebut pengawasan Dinas Pertanian berguna agar pelaksanaan pekerjaan maupun tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai dapat diketahui sudah sejauh mana apakah berjalan lancar atau terdapat beberapa penyimpangan yang perlu diperbaiki, dengan pengawasan yang dilakukan Dinas

Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mengevaluasi terdapatnya hambatan atau kegagalan dalam pencapaian program. Pengawasan juga sangat membantu pimpinan apakah dalam menjalankan tugasnya pegawai terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga dapat diperbaiki dan mencegah terjadinya penyimpangan dimasa mendatang Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Pengawasan terhadap pegawai atau bawahan sangat penting dilakukan. Pengawasan bukan hanya dijalankan sekedar pencapaian kerja suatu pegawai dengan apa yang telah direncanakan tetapi sebuah proses pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai keberhasilan pekerjaan.

Memberi bantuan secara langsung kepada petani secara terus menerus akan memberikan dampak yang kurang baik, yang mengakibatkan petani menjadi kurang mandiri. Pemberdayaan kelompok tani dengan memberikan kesadaran kepada kelompok dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif perlu dikembangkan. Pemberdayaan diberikan agar kelompok tidak terus menerus tergantung pada fasilitator dan kemudahan

yang disediakan pemerintah secara gratis, tetapi diarahkan untuk kemandirian kelompok.

Salah satu cara yang dilakukan kelompok untuk kemandirian kelompok tani yang diarahkan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan pengembalian benih kepada kelompok setelah panen, namun cara ini kurang berhasil, karena petani menganggap bantuan pemerintah tidak perlu dikembalikan. Untuk tujuan pemberdayaan petani sebaiknya dibuat ketegasan dalam Pedoman Umum, misalnya dengan perguliran sehingga semua petani bisa menanam hibrida dan program bisa berkelanjutan. Tidak mungkin petani akan mengandalkan bantuan terus menerus, disamping anggaran akan terbatas, juga peningkatan SDM petani untuk meningkatkan kesejahteraannya akan sulit dicapai. Dalam pengembangan agribisnis jagung, komponen yang diperlukan bukan hanya benih saja. Penggunaan benih hibrida memerlukan pengusahaan yang intensif agar bisa menghasilkan produk yang optimal, sehingga pengadaan sarana produksi lain selain benih, seperti pupuk, herbisida dan pestisida perlu diperhatikan.

Dalam pengembangan kawasan, sarana dan fasilitas kelompok tani perlu dibangun, seperti: jalan usahatani, pengadaan alat dan mesin pertanian, dryer, corn seller dan sebagainya. Permodalan dan kredit usahatani perlu difasilitasi, demikian juga pengembangan kelompok tani itu sendiri. Karena dana bantuan hanya diperuntukkan untuk pengadaan benih, maka dukungan dana untuk komponen/kegiatan lain dalam pengembangan agribisnis masih diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow, diperoleh informasi bahwa:

“luas area pertaian jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah 570.374 ha dengan produksi 164.991 ton pada tahun 2020. Dengan rata-rata pertumbuhan produksi 7 persen

per tahun, khusus untuk Kecamatan Dumoga Barat luas lahan sebesar 65.378 ha dengan produksi 57.221 ton, dari data ini jelas bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai potensi dalam pengembangan produksi jagung”.

Dalam pengembangan komoditas jagung Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Pertanian mempunyai program untuk mengembangkan komoditi jagung yang maju, tangguh dan efisien, berorientasi agribisnis, berwawasan lingkungan melalui pendekatan kemandirian lokal. Secara terperinci program-program tersebut adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komoditas jagung menghadapi pasar global
- b. Pemberdayaan masyarakat tani untuk mengembangkan sistem dan usaha agribisnis melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas jagung.
- c. Mengembangkan inovasi teknologi spesifik lokasi
- d. Mendorong peran Kabupaten Bolmong sebagai pusat pelayanan pertanian di Sulawesi Utara.

Saat ini pertanaman jagung di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya di masih didominasi oleh budidaya yang tradisional, dengan potensi yang ada, terutama sumberdaya lahan dan iklim; produksi jagung masih bisa ditingkatkan dengan pengenalan dan penyebarluasan budidaya introduksi. Berkembangnya jagung hibrida sudah dikenal oleh petani setempat namun belum banyak petani yang menggunakan karena harga benih mahal, sehingga subsidi pengadaan benih hibrida sangat diperlukan.

Secara terperinci Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow mengungkapkan bahwa: *“selain dilihat dari potensinya, awal pemikiran subsidi benih ini dimulai saat dicanangkannya CCB (Celebes Corn Belt)*

oleh pihak swasta. Alasannya, Pulau Sulawesi tidak mempunyai Sumber Daya Alam yang cukup dibandingkan dengan Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan, dan potensi yang bisa dikembangkan adalah jagung. Pemikiran ini ditindaklanjuti pada saat Dr. Farid Bahar menjabat sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dilanjutkan dengan penerapan sistem agribisnis oleh Menteri Pertanian Prof. Bungaran Saragih dan saat ini diperkuat oleh kebijakan Wapres Yusuf Kalla saat itu untuk melaksanakan pengembangan jagung Sulawesi melalui subsidi benih. Di tingkat provinsi pelaksanaan kebijakan program subsidi benih ini dilaksanakan secara bertahap, pada wilayah yang mempunyai potensi jagung dan penggunaan jagung hibrida belum berkembang. Indikator keberhasilan program subsidi benih ini dilihat dari perkembangan realisasi tanam atau panen, tingkat produksi dan produktivitas jagung, serta serapan tenaga kerja dalam usahatani jagung dan tingkat pendapatan petani jagung”.

Untuk pengendalian program ini agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Tim Teknis Kabupaten dan Tim Pembina provinsi membuat laporan pengendalian bulanan. Pelaksana program subsidi benih jagung ini adalah di tingkat kabupaten, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten. Tugas Dinas Pertanian tingkat provinsi hanyalah sebagai pembina, membuat evaluasi dan monitoring. Hingga pertengahan tahun 2021 ini pelaporan monitoring dan evaluasi masih dalam proses penyusunan. Pelaporan yang ada hanya dalam bentuk sasaran dan realisasi tanam dan panen. Pada tahun 2018, daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat dana dari Pusat dan kebijakan subsidi ini dilanjutkan pada tahun 2019/2020. Namun terjadi perubahan sistem subsidi, pada tahun 2020 bentuknya merupakan bantuan langsung benih dengan distributor yang ditunjuk langsung dari pusat. Karena perubahan ini, terjadi permasalahan dalam implementasi subsidi benih ini, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang:

“Benih yang seharusnya tersedia di tingkat petani beberapa saat sebelum musim tanam, karena perubahan sistem tidak bisa tersedia dengan baik.

Petani tidak bisa menunda tanam karena tergantung pada hujan sebagai sumber air untuk budidaya jagung. Beberapa kabupaten membuat solusi dengan meminjam benih dari produsen benih karena dana yang tersalur untuk tahun 2020 baru mencapai 10 persen hal ini lebih disebabkan karena pandemi covid19, sehingga terjadinya kebijakan reconfusing anggaran pemerintah”.

Kebijakan dalam menentukan daerah atau wilayah penerima subsidi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Wilayah tersebut adalah sentra produksi jagung dan merupakan daerah yang belum menanam jagung hibrida atau yang masih menanam hibrida F2.
- b. Penentuan wilayah sentra produksi jagung ditentukan berdasarkan potensi lahan pertanaman jagung selama 5-10 tahun dan rata-rata luas tanah selama 5 tahun terakhir.
- c. Besarnya permintaan jagung dan persaingan dengan komoditas lainnya, misalnya: jagung bersaing dengan padi, tetapi permintaan terhadap jagung tinggi sebagai bahan baku pakan, karena di wilayah tersebut berkembang peternakan ayam.
- d. Daerah penerima subsidi ini ditentukan oleh Kepala Dinas Kabupaten.

Dalam pelaksanaan subsidi benih ini organisasi pelaksana dirasakan sudah cukup baik, namun masih bersifat parsial. Untuk koordinasi yang lebih efektif dan keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Bantuan Benih ini, organisasi harus bersifat holistik, dimana semua subsistem agribisnis; seperti pasar untuk penampungan produksi, pengadaan modal dan sarana produksi, penyuluhan dan infrastruktur; perlu dikembangkan. Kelembagaan penangkar benih juga perlu dibina, agar ketersediaan benih bermutu di tingkat petani selalu tersedia dan bisa berkelanjutan.

Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat alokasi subsidi benih sebesar 1.004 ton benih jagung untuk dibagikan kepada 10 kecamatan. Realisasi per kecamatan hampir dapat menepati angka seratus persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi subsidi benih mencapai 99,9 persen. Target areal seluas 570.374 ha dengan kebutuhan benih 1.114,62 ton untuk 1204 kelompok tani, bisa direalisasikan seluas 570.127,79 ha dengan benih 1.004,55 ton. Namun realisasi per kecamatan sangat bervariasi sebagai akibat kurang perhitungan dalam perencanaan.

Variasi tersebut juga disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan teknis di lapangan. Keberhasilan pencapaian target dalam melaksanakan program subsidi benih jagung ini belum bisa menyelesaikan pencapaian target yang sebenarnya dimana peningkatan produksi jagung ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani jagung itu sendiri. Pasar dan pasca panen masih menjadi kendala yang serius, terutama pada saat panen raya. Saat ini produksi jagung di daerah sentra produksi sebagian besar dipasarkan ke pedagang besar yang berfungsi sebagai pemasok bahan baku bagi industri pakan ternak dan pemasok eksportir. Keterbatasan tujuan pasar bisa menimbulkan struktur pasar yang monopoli atau oligopoli.

Lebih jauh lagi diperoleh informasi dari Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura tentang benih jagung yang didatangkan dari pulau Jawa khususnya Jawa timur, sebagai berikut:

“benih-benih jagung hibrida di Kabupaten Bolaang Mongondow didatangkan dari Jawa Timur. Penangkar benih di Sulawesi Utara belum ada, dan baru dalam tahap penjajagan. Kebun-kebun benih di Sulawesi Utara baru mampu menghasilkan benih jagung komposit (varietas Lamuru), sehingga benih jagung hibrida belum dikenal baik. Hal ini berbeda dengan petani jagung di Jawa Timur, petani Jawa Timur telah mengenal dengan baik jagung hibrida karena banyak penangkar sekitarnya. Petani jagung Jawa Timur sudah bisa menentukan varietas hibrida yang cocok dengan lahan

pertaniannya, sehingga penggunaan varietasnya sangat bervariasi. Di Bolaang Mongondow sebagian besar petani menggunakan varietas hibrida BISI-2. Distributor benih jagung hibrida berlokasi di Manado, petani membeli benih jagung ini dari kios kios saprodi. Setelah adanya kebijakan subsidi benih jagung, distributor langsung mendistribusikan benih ke kelompok tani dan petani memperolehnya dari kelompok tani. Harga benih BISI-2 dipasaran berkisar antara Rp 26.500/kg hingga Rp 28.000/kg”.

Dalam pengembangan jagung Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Pertanian mempunyai visi yaitu mewujudkan masyarakat tani yang mandiri melalui sistem pertanian modern dan berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal dan berwawasan agribisnis jagung, dengan misi yaitu mengembangkan keterpaduan sentra produksi dengan industri pengolahan dan pemasaran, serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan agribisnis jagung dan penguatan kelembagaan.

Jagung sebagai sumber bahan makanan pokok, bahan baku pakan dan sumber devisa; merupakan salah satu komoditas pangan yang potensial dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow. Disamping itu, tipe iklim dengan bulan hujan rata-rata 3 bulan per tahun dan musim kemarau yang panjang dirasakan hanya cocok untuk jagung. Aspek lain yang mendukung pengembangan jagung adalah tersedianya pasar baik lokal maupun regional, jagung merupakan usahatani masyarakat dan potensi lahan yang cukup luas sebesar kurang lebih 45.000 ha. Dalam peningkatan produksi jagung, Kabupaten Bolaang Mongondow menjalankan kebijakan melalui program-program peningkatan kompetensi SDM, pemantapan kelembagaan, penyediaan dan penerapan teknologi agribisnis jagung, penetapan standar kualitas dan manajemen produksi jagung serta

pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran jagung.

Program-program tersebut dituangkan dalam berbagai jenis kegiatan antara lain adalah Gerakan Jagung Berjaya pada tahun 2020 yang meliputi kegiatan mendorong lembaga keuangan untuk berperan aktif memfasilitasi penyediaan sarana produksi ditengah kesulitan ekonomi masa pandemi covid19, perbaikan infrastruktur usahatani, pengembangan iklim usaha dan investasi, serta pengembangan pasar, pasca panen dan alat mesin pertanian. Kelembagaan perbenihan juga mulai dikembangkan dengan menggunakan dana DAK pada tahun 2019 seluas 500 ha. Dengan menggunakan dana APBD dikembangkan perbenihan di lahan sawah seluas 25 ha, serta peningkatan Indeks Pertanaman jagung dari 100 menjadi 200.

Kebijakan dalam menentukan petani penerima subsidi benih jagung adalah petani yang sanggup menanam jagung hibrida dan petani yang menjadi anggota kelompok tani. Di Kabupaten Bolaang Mongondow, begitu pula di Kecamatan Dumoga Barat, subsidi benih jagung diberikan pada semua petani jagung dengan pengaturan jatah benih per petani yang garapannya rata-rata kurang atau sama dengan 1 ha. Bagi petani mempunyai garapan lebih dari 1 ha, yang mendapat subsidi hanya 1 ha, sebagian diberikan pada anggota lain yang terlambat mengajukan proposal sehingga semua petani bisa memperoleh benih subsidi dan jagung hibrida bisa merata ditanam dalam satu hamparan usahatani.

Dalam implementasi kebijakan tersebut tidak ditemukan kendala, hal ini seperti yang dijelaskan oleh kepala Dinas Pertanian Kab. Bolmong yang mengatakan bahwa:

“hingga saat ini tidak ditemukan permasalahan yang serius pada organisasi implementasi. Yang menjadi masalah adalah ketersediaan dana dari pemerintah pusat yang tidak tepat waktu, petani mengharapkan dana dapat dicairkan tepat waktu pada saat akan tanam sehingga produksi bisa optimal karena air hujan masih tersedia. Saat ini

permasalahan tersebut diatasi dengan penyaluran benih secara natura melalui pinjaman dari distributor, sedangkan bantuan benih langsung untuk tahun 2020 belum bisa diperoleh dikarenakan pandemi covid19”.

Pemberian subsidi benih jagung memang sangat dibutuhkan karena komoditas pertanian yang dapat diandalkan di Kabupaten ini adalah jagung. Namun demikian pemberian subsidi harus berhati-hati karena subsidi cenderung memanjakan petani, dan petani akan menuntut subsidi secara terus menerus. Untuk menghindarkan ini, pemerintah daerah meminta petani mengembalikan subsidi benih setelah panen dan dibayarkan kepada Kelompok Tani. Dengan demikian Kelompok Tani mendapat biaya untuk memperkuat dirinya.

Desain pemberian subsidi dari pemerintah pusat sebaiknya disesuaikan dengan wilayah penerima subsidi. Karena indikator keberhasilan penyaluran subsidi adalah bahwa benih sampai ditangan petani tepat waktu, tepat mutu dan tepat jumlahnya. Indikator keberhasilan penyaluran subsidi berdasarkan target penyaluran adalah tidak tepat. Hal ini berhubungan dengan pemerintah daerah yang tidak dapat menyediakan dana yang cukup untuk melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada tingkat petani, sehingga pemerintah hanya bisa mengawasi sampai kecamatan saja. Jika indikator keberhasilan adalah sampai pada tingkat petani, maka diperlukan biaya untuk monitoring dan evaluasi sampai pada petani.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran keberhasilan penyaluran subsidi benih jagung, maka Dinas Pertanian menyarankan agar alokasi subsidi benih menggunakan kriteria berikut:

- a. Daerah yang belum biasa menanam jagung hibrida
- b. Belum pernah menerima bantuan 2019
- c. Daerah yang masih menanam hibrida F2
- d. Petani dalam kelompok tani dan bersedia menyusun RDKK

- e. Ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolmong.

Kelompok tani berpendapat bahwa akan semakin banyak petani berhasil jika petani juga memperoleh subsidi pupuk dan pelayanan pasar input dan output. Menurut kelompok tani produktivitas jagung bisa meningkat rata-rata 75 persen jika kebutuhan infrastruktur dan pelayanan pasar input terpenuhi. Petani secara keseluruhan menyambut pelayanan subsidi benih oleh pemerintah karena sangat membantu dalam pengadaan benih hibrida. Benih hibrida selain sulit memperolehnya juga harganya relatif mahal. Petani menyatakan bahwa realisasi subsidi benih sangat baik pada musim hujan (MH) saja. Pada MK, dibutuhkan infra struktur yang dapat menunjang seperti pompa air, traktor serta tambahan pupuk. Penyaluran pada MH dapat meningkatkan produktivitas antara 40-75 persen. Permasalahannya saat ini adalah petani belum sepenuhnya menerapkan teknologi anjuran karena tidak disertai dengan pelayanan sarana produksi. Perbaikan teknologi pupuk hampir tidak dilakukan dan pengolahan tanah dilakukan tanpa pembajakan.

Seorang informan Petani jagung yang ada di Kecamatan Dumoga Barat berpendapat bahwa:

“Pelayanan subsidi harus diperluas dalam arti terjadi perluasan areal tanam, dan peningkatan intensitas tanam. Dalam hal ini pemberian subsidi dengan konsep pemerataan tidak mempunyai dampak terhadap perluasan dan intensitas tanam, kecuali jika pemerataan itu dilakukan dalam dimensi waktu (bergiliran) sehingga seorang petani menerima subsidi benih cukup untuk perluasan meningkatkan intensitas tanam”.

Walaupun petani memperoleh subsidi benih untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, namun tidak disertai dengan pelayanan sarana fisik (jalan, pompa, dryer dan pasar). Setelah adanya program subsidi benih, kelembagaan kelompok tani diperkuat, beberapa kelompok tani sudah mulai bertindak sebagai pedagang pengumpul dan dapat menjual langsung produksi

jagung ke pedagang pengumpul tingkat provinsi atau langsung memasok pabrik pakan, bahkan pedagang besar tingkat provinsi banyak yang masuk ke desa untuk mencari jagung. Dengan memendeknya saluran pasar diharapkan sebagian besar margin pasar dapat dinikmati petani. Harga jagung saat ini sudah membaik, namun masih belum stabil.

Beberapa para kelompok tani jagung yang telah diwawancarai mereka menanggapi positif untuk bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Pertanian dalam meningkatkan produktivitas tanaman jagung. Dalam hal ini Dinas Pertanian telah berupaya memberikan bantuan kepada para petani salah satunya bantuan benih jagung, pupuk organik, pupuk kimia maupun pestisida. Begitu juga dengan bantuan alat mesin pertanian yang diberikan untuk memudahkan para petani dalam menanam jagung. Selain itu adanya pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh terhadap para petani untuk melihat sejauh mana para petani dapat bekerja selama di lapangan dalam mengolah tanaman jagung tersebut dengan baik, bukan hanya melakukan pendampingan saja para penyuluh berperan dalam mensosialisasikan penggunaan alat mesin pertanian beserta pelatihan yang telah diberikan dengan tujuan mereka mampu menggunakan alat mesin pertanian dengan baik agar mereka mampu menghasilkan produktivitas tanaman jagung lebih banyak secara cepat tanpa harus menggunakan cara tradisional.

5.3. Pembahasan

Dampak subsidi benih jagung memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan petani. Subsidi benih tidak berpengaruh terhadap perluasan areal tanam dan intensitas tanaman. Dua penyebabnya adalah (a) petani tidak ingin memperluas produksi karena risiko pemasaran jika terjadi panen raya. (b) tidak ingin merubah struktur pembiayaan yang sudah ada, karena khawatir risiko kegagalan produksi dan (c) pemberian subsidi benih jagung sangat

terbatas karena dibagi rata di antara petani.

Dari segi budidaya, tidak terjadi perubahan pola tanam dan teknologi input. Perubahan yang terjadi hanya perubahan teknologi benih dari komposit dan hibrida F2 menjadi hibrida murni. Dengan perubahan teknologi benih ini profitabilitas usaha naik sebesar 15,2 persen, dengan peningkatan pendapatan bersih sekitar 35 persen. Secara keseluruhan, hingga saat ini implementasi Kebijakan Bantuan Benih sudah dianggap baik. Hal-hal yang masih perlu ditingkatkan adalah perencanaan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan. Ketepatan penyaluran benih pada saat tanam sangat diperlukan, keterlambatan tanam menyebabkan kegagalan. Untuk keberhasilan sebaiknya system bersifat holistik, dimana lembaga penunjang; seperti: penyediaan saprodi, modal, pasca panen, alsintan, pasar dan penyuluhan, juga dikembangkan. Selain itu, pengembangan yang optimal tidak akan segera tercapai karena kualitas SDM (moralitas dan kapasitas). Jika ingin melihat keberhasilan dengan baik, subsidi bisa diberikan pada daerah penghasil utama jagung yang agribisnisnya sudah relatif baik, kemudian disebar pada daerah lain yang berpotensi dengan pembinaan yang intensif. Musim tanam yang terbaik dalam pemberian subsidi adalah musim penghujan, sekitar bulan Oktober. Untuk itu dana sebaiknya dapat dicairkan sebelum musim penghujan, sehingga benih tersedia tepat saat dibutuhkan petani untuk bisa menghasilkan produksi yang optimal. Dalam era otonomi daerah, faktor yang penting dalam keberhasilan program pemerintah pusat ini adalah kebijakan pemerintah daerah. Apakah program pemerintah daerah bisa sejalan atau menunjang program pemerintah pusat dalam pengembangan kebijakan subsidi benih jagung ini.

Program subsidi benih jagung yang diawali pada tahun 2015 dan akan terus dilanjutkan pada tahun 2021 perlu dicermati lebih intensif khususnya dalam pelaksanaannya. Banyak masalah yang terjadi di lapangan, baik masalah

kebijakan yang diterapkan maupun masalah teknis yang dihadapi. Salah satu kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan pusat adalah mewajibkan petani membayar besaran subsidi yang diterimanya kepada kelompok tani. Dana pembayaran kembali menjadi milik kelompok tani yang dapat digunakan untuk memberdayakan dirinya misalnya membeli alat pemipil dan pengering jagung. Kebijakan ini menekankan bahwa subsidi hanya berlaku pada tingkat kelompok tani bukan petani. Walaupun kenyataan di lapang kebijakan daerah ini tidak berlaku efektif namun kebijakan ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dalam kerangka pengembangan kelompok tani.

Dampak subsidi benih terhadap produksi, produktivitas dan pendapatan petani sangat bervariasi yang masing-masing ditentukan oleh penerimaan subsidi benih yang tepat waktu, mutu dan jumlah; perubahan cuaca, terutama kekeringan; praktek budidaya yang tidak mengalami perubahan dari tradisional ke cara-cara yang sesuai dengan budidaya jagung hibrida; jumlah benih jagung yang diterima petani dibatasi hanya 1 hektar supaya sebagian besar petani memperoleh subsidi (pemerataan). Akibatnya petani tidak mungkin memperluas usaha penanaman dan kelompok tani tidak siap menyalurkan benih kepada petani sehingga benih subsidi tidak dapat digunakan.

Subsidi benih diberikan langsung atau tidak langsung kepada petani bukanlah masalah pokok bagi petani. Apapun caranya, subsidi memastikan bahwa petani mendapat benih secara cuma-cuma. Namun demikian, pemberian subsidi kepada petani diperkirakan oleh pemerintah daerah tidak mendidik dan hanya memanjakan petani. Pemerintah daerah merasa sangat khawatir, apa yang terjadi jika subsidi dari pemerintah pusat tidak ada lagi. Pemerintah daerah tidak mempunyai semangat penuh menyukseskan kegiatan subsidi ini. Oleh karena itu, pemberian subsidi haruslah sedemikian rupa, sehingga pada saat

subsidi ditiadakan, ekonomi petani telah menjadi kuat secara mandiri.

Pengalaman memperlihatkan pelaksanaan subsidi benih menghadapi berbagai masalah teknis di lapang sehingga target penyaluran subsidi tidak dapat dipenuhi. Pengamatan di lapang memperlihatkan bahwa permasalahan teknis yang muncul tersebut merupakan konsekuensi dari sistem subsidi yang diatur dari pusat atau bersifat top down. Sistem top down relatif tidak mempertimbangkan kondisi penerima subsidi (petani) secara intensif. Dengan demikian, permasalahan ini tidak bisa dihindarkan kecuali merubah pola top down menjadi pola moderat.

Penyaluran subsidi benih yang ideal adalah bagaimana benih sampai ditangan petani tepat pada saat yang dibutuhkan. Konsekuensi dari penyaluran seperti itu adalah pemerintah menempatkan petani sebagai bahan pertimbangan utama dalam menyalurkan benih subsidi. Apa yang telah terjadi adalah pemerintah terkesan memaksakan penyaluran dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat general. Seharusnya, pemerintah memahami benar tingkah laku petani, sehingga penyaluran subsidi dapat dilakukan spesifik petani. Tentu hal ini sangat ideal, namun secara normatif kesana lah arah kebijakan penyaluran itu.

Penutup

Kesimpulan

1. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam program benih jagung meliputi teknik Inspeksi langsung, on the spot observation, dan Pengawasan on the spot report. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Pertanian masih dianggap kurang dan belum optimal karena benih yang disalurkan hanya diinspeksi pada saat akan diserahkan, tindak lanjut dilapangan tidak dilakukuan pengawasan oleh BPP yang merupakan perpanjangan tangan Dinas Pertanian yang ada di Kecamatan, sehingga Dinas Pertanian tidak memiliki data akurat pemanfaatan benih jagung yang telah didistribusikan.

2. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow adalah dengan melakukan pengumpulan data-data mengenai penggunaan benih, luas lahan yang digunakan, dan hasil produksi/panen yang dihasilkan, serta seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan petani dengan adanya pemberian bantuanbenih jagung tersebut.

Saran

1. Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow hendaknya melakukan preventive control yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan maksud saat dilaksanakan tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan preventive control ini adalah pengawasan yang terbaik karena pengawaasan ini dilakukan saat sebelum terjadi kesalahan.
2. Pengawasan mendadak, yaitu pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui pelaksanaan dan aturan yang telah ditetapkan dilaksanakan atau tidak terkait dengan program benih jagung yang didistribusikan kepada kelompok tani.
3. Dinas Pertanian hendaknya dapat memanfaatkan metode pengawasan konsumen (*informal control*), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat

Daftar Pustaka

Adiwilaga, Anwas. 1992. Ilmu Usaha Tani: Cetakan II. Bandung: Alumni.

Dahana Daru Harvianto. 2019. Pemberdayaan Petani Jagung Oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Studi di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau). Jurnal Pertanian. Volume 2 No.2, September 2019:177-201.

Ernie dan Saefullah, 2005, Pengantar Manajemen, Penerbit: Prenada Media Jakarta

Fahmi, Irham. 2014. Perilaku Organisasi. Alfabeta: Bandung

Henny Mayrowani. 2008. Evaluasi Kebijakan Subsidi Benih Jagung Kasus Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan. Jurnal Pertanian. Volume 6 No. 3, September 2008: 256-271.

Hasibuan, Melayu. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara: Jakarta

Ibnu Sukotjow. 2007. Pengantar Bisnis Modern. Liberty: Yogyakarta

Jauhari, Hasnun Ritonga. 2015. Manajemen Organisasi. Perdana Publishing: Medan.

Marigan, Masry, Simbolon. (2004). Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Graha Indonesia.

Rodjak, A. 2002. Dasar-dasar Manajemen Usaha Tani. Universitas Padjadjaran Press. Bandung

Siagian P, Sondang. 2004. Audit Manajemen. Bumi Aksara: Jakarta

_____. 2003. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara

Suardi, Amran. 2014. Sistem Pengawasan Badan Perdilan di Indonesia. Rajawali Pers: Jakarta

Setyowati. 2013. Organisasi dan Kepemimpinan Modern. Graha Ilmu: Yogyakarta

Suriansyah, 2014. Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah. Pustaka Pelajar.

Sugiono, 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.